



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Kamis 20 Maret 2025



Ketua H. Abdillah Nashih Wakil Ketua Suyarno, S.H., M.H. Wakil Ketua H. Kayan, SH Wakil Ketua Warih Andono, SE

RINGKASAN BERITA HARI INI

Sidoarjo

Jawa Pos METROPOLIS • KAMIS 20 MARET TAHUN 2025 | HALAMAN 18

Kendaraan dari Sidoarjo Masih Menumpuk di Raya Waru

Saat Uji Coba Satu Jalur Jalan Letjen Sutuyo

SIDOARJO - Tidak ada uji coba satu jalur atau *one way* di Jalan Letjen Sutuyo Waru kemarin (19/3). Lalu lintas pada akses menuju pintu masuk Terminal Purabaya itu seperti hari biasa. Satlantas Polresta Sidoarjo kemarin fokus mengevaluasi kekurangan uji coba hari sebelumnya. Menurut pengamatan, se-

lama pelaksanaan uji coba itu jalanan sekitar terpantau padat. Ruas Raya Waru salah satunya. Terjadi penumpukan kendaraan dari selatan atau Sidoarjo yang tidak boleh belok ke barat ke arah Medaeng. Sebab, pengendara harus bergantian dengan kendaraan dari barat di *traffic light* (TL) bawah fly over. "Titik tersebut jadi bahan evaluasi," kata Kanitkamsel Polresta Sidoarjo Iptu Ali Rifqi Mubarak. Ali menjelaskan, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub)

EVALUASI ONE WAY JALAN LETJEN SUTOYO

- 1. Uji coba di hari kedua dilakukan
- 2. Durasi TL di bawah fly over Waru diatur ulang
- 3. Dilakukan pemantauan untuk memastikan durasi baru sesuai
- 4. Koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan

Sumber: Polresta Sidoarjo



Penerapan *one way* ini agar arus lalu lintas terkendali ketika musim arus mudik dan balik

IPTU ALI RIFIQI MUBAROK
Kanitkamsel Polresta Sidoarjo

penyesuaian kembali. "Untuk memastikan kebutuhan, akan kami pantau secara berkala," ungkapnya. Ali menambahkan, penerapan uji coba sejak awal diterapkan secara situasional. Yang terpenting, saat pelaksanaan satu jalur secara resmi

bisa berjalan sesuai harapan. "Muaranya, arus lalu lintas terkendali ketika musim arus mudik dan balik," tuturnya. Kasatlantas Polresta Sidoarjo AKP Jodi Indrawan mengatakan, sistem satu jalur rencananya akan diterapkan resmi sejak 21 Maret sampai

8 April. Namun, pelaksanaan tetap akan memperhatikan kondisi di lapangan. "Dalam prosesnya, koordinasi dengan instansi terkait akan terus dilakukan agar tidak ada hambatan," katanya. Berdasarkan analisisnya, bus menjadi salah satu moda transportasi favorit pilihan pemudik. Jadi, kelancaran akses yang dilalui perlu mendapat prioritas. Jodi meminta masyarakat yang terdampak rekayasa maklum. Khususnya pengendara yang harus memutar. (edi/uzi)

Safari Ramadan, Sosialisasikan Hotline Mudik untuk Situasi Darurat



BERBAGI: Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing saat Safari Ramadan bersama anak yatim.

KOTA-Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing memanfaatkan momen Safari Ramadan tidak hanya untuk berbagi dengan masyarakat, tetapi juga untuk mensosialisasikan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta layanan hotline mudik Polri 110.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Masjid Day All, Binjari, Tangulangi, Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing berinteraksi dengan warga, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Forkopimka setempat. Acara dimulai dengan buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada masyarakat yang membutuhkan. "Safari Ramadan ini bertujuan agar Polresta Sidoarjo semakin dekat dengan masyarakat serta dapat berbagi kebahagiaan di bulan suci ini," ujar Kombes Pol Christian Tobing. Menjelang arus mudik Lebaran, ia mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati saat dalam perjalanan.

In juga mempromosikan layanan hotline mudik Polri 110, yang dapat digunakan oleh pemudik untuk melaporkan kejadian darurat atau gangguan kamtibmas selama perjalanan mudik dan balik. "Hotline ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat saat mudik," jelasnya. Ia menambahkan bahwa hotline Polri 110 dapat digunakan untuk melaporkan berbagai kejadian darurat, seperti kecelakaan, tindak kriminalitas, atau gangguan keamanan lainnya. "Jika masyarakat mengalami atau saksi kriminalitas atau aksi kriminalitas, masyarakat bisa

langsung menghubungi hotline tersebut agar segera mendapat bantuan," tuturnya. Dengan adanya layanan ini, diharapkan perayaan Idul Fitri tahun ini dapat berlangsung dengan aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. (gun/vgn)

Siapkan Kereta Api Tambahan untuk Mudik Lebaran dari Stasiun Sidoarjo

KOTA-Jumlah penumpang Kereta Api (KA) di Stasiun Sidoarjo diprediksi akan melonjak selama masa mudik Lebaran tahun ini. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, KAI Daop 8 Surabaya menyiapkan kereta api tambahan guna memberikan pilihan perjalanan yang lebih luas bagi masyarakat. Salah satu kereta api tambahan yang dijadwalkan beroperasi adalah KA Mutiara Timur dengan rute Stasiun Sidoarjo-Stasiun Kotapang, Banyuwangi, dan sebaliknya.

"KA Mutiara Timur tambahan akan beroperasi pada malam hari, dengan keberangkatan dari Stasiun Sidoarjo pukul 22.23 dan tiba di Stasiun Kotapang pukul 03.40," ujar Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, Rabu (19/3). Sebaliknya, keberangkatan dari Stasiun Kotapang dijadwalkan pukul 08.40 dan tiba di Stasiun Sidoarjo pukul 14.08. KA Mutiara Timur tambahan ini memiliki kapasitas sebanyak 300 tempat duduk di kelas eksekutif.

● Ke Halaman 10

Bertemu KPK, Bupati Diminta Komitmen Kelola Pemerintahan yang Bersih



KOORDINASI: Bupati Sidoarjo Subandi dan Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nashih hadir rakor dengan KPK di Yogyakarta.

KOTA-Dalam upaya memperkuat komitmen kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah di Joga Expo Center, Yogyakarta, Rabu (19/3/2025). Rapat ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat tata kelola

pemerintahan daerah pasca-pelantikan kepala daerah baru. KPK berharap rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi kepala daerah dalam menjaga komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa tema rapat yang awalnya berfokus pada "Penguatan Kepala Daerah" lebih tepat diganti menjadi "Komitmen Kepala Daerah." Menurut Setyo, kepala daerah telah melewati berbagai tantangan, mulai dari proses

pelafitan, kampanye, hingga pemilihan yang penuh perjuangan. Setelah dilantik dan menjalankan tugas, kepala daerah telah melewati banyak tantangan. Mereka telah melalui pendidikan, pelatihan, dan proses panjang yang tidak mudah. Setelah dilantik dan mengucapkan sumpah, komitmen mereka untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik harus terus dijaga," ujar Setyo Budiyanto.

● Ke Halaman 10



PERSIAPAN: Rangkaian KA Mutiara Timur juga menghadirkan layanan Kereta Panoramic.

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo

Dikbud Buka Tiga Jalur Khusus SPMB

Kerja Sama 13 SMP Negeri dan Swasta

SIDOARJO - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo membuka tiga jalur khusus dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB). Tujuannya, mengakomodir siswa berbakat dan beprestasi.

Kepala Dikbud Sidoarjo Tirto Adi mengatakan, penerimaan siswa baru akan dibuka melalui beberapa jalur. Selain jalur domisili, afirmasi dan prestasi, Sidoarjo menambahkan tiga jalur khusus untuk siswa berbakat di jenjang SMP.

Yakni, jalur Kelas Khusus Olahraga (KKO), Layanan Individu Cerdas Istimewa (LICI), dan Kelas Khusus Seni Budaya (KKSB). "Jalur KKO disediakan bagi siswa berbakat di bidang olahraga," katanya. Menurutnya program tersebut bisa meningkatkan prestasi siswa dalam

JALUR KHUSUS SPMB

Kelas Khusus Olahraga (KKO):



Sekolah:
SMPN 2 Sidoarjo
dan SMP PGRI 9 Sidoarjo

Pagu:
32 murid

Layanan Individu Cerdas Istimewa (LICI):



Sekolah:
SMPN 1 Sidoarjo, SMPN 1 Sedati,
SMPN 3 Sidoarjo, SMPN 5 Sidoarjo,
SMPN 1 Krian, SMPN 1 Taman,
dan SMP Bumi Shalawat

Pagu:
28 murid

Kelas Khusus Seni Budaya (KKSB):



Sekolah:
SMPN 4 Sidoarjo,
SMP Negeri 1 Buduran,
SMP Negeri 1 Tulangan,
dan SMP PGRI 1 Buduran.

Pagu:
32 murid

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo

GRAFIS: HERLAMBAH/JAWA POS

dasar emosional dan kreativitas yang tinggi," imbuhnya.

Nilai akademiknya harus baik. Terutama mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris

ajang olahraga tingkat daerah maupun nasional.

"Dengan pembinaan yang tepat, maka siswa di KKO bisa berpartisipasi dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda)," jelasnya. Sementara, jalur LICI untuk anak dengan kecerdasan istimewa. "Program ini ditujukan bagi siswa dengan IQ minimal 120 serta memiliki kecer-

Sedangkan jalur KKSB, dirancang untuk siswa berbakat dalam bidang kesenian." Tujuannya, supaya mereka dapat berpartisipasi dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)," tambahnya.

"Kepala sekolah di masing-masing unit kami meminta untuk menginventarisasi siswa berbakat yang akan mengikuti program ini," katanya. (eza/uzi)

Jawa Pos

Sidoarjo

Jawa Pos METROPOLIS • KAMIS 20 MARET TAHUN 21

Kendaraan dari Sidoarjo Masih Me

Saat Uji Coba Satu Jalur Jalan Letjen Sutoyo

SIDOARJO - Tidak ada uji coba satu jalur atau *one way* di Jalan Letjen Sutoyo Waru kemarin (19/3). Lalu lintas pada akses menuju pintu masuk Terminal Purabaya itu seperti hari biasa. Satlantas Polresta Sidoarjo kemarin fokus mengevaluasi kekurangan uji coba hari sebelumnya.

Menurut pengamatan, se-

lama pelaksanaan uji coba itu jalanan sekitar terpantau padat. Ruas Raya Waru salah satunya. Terjadi penumpukan kendaraan dari selatan atau Sidoarjo yang tidak boleh belok ke barat ke arah Medaeng. Sebab, pengendara harus bergantian dengan kendaraan dari barat di *traffic light* (TL) bawah *fly over*. "Titik tersebut jadi bahan evaluasi," kata Kanitkamsel Polresta Sidoarjo Iptu Ali Rifqi Mubarak.

Ali menjelaskan, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub)

EVALUASI ONE WAY JALAN LETJEN SUTOYO

- 1 Uji coba di hari kedua ditladakan
- 2 Durasi TL di bawah fly over Waru diatur ulang
- 3 Dilakukan pemantauan untuk memastikan durasi baru sesuai
- 4 Koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan

Sumber: Polresta Sidoarjo

untuk mengevaluasi durasi TL. Tujuannya memastikan sesuai dengan volume kendaraan yang melintas. "Jadi, kami atur ulang durasinya

agar lebih optimal," jelasnya. Lebih lanjut, perubahan durasi juga belum mengikat. Ali mengatakan, kalau memang diperlukan bakal ada

pen
tuki
aku
berh
Ali
pan
rapk
Yang
sana

Jawa Pos



ANONGER BONDAN/JAWA POS

TAMBAH ARMADA: Para calon penumpang KA Sri Tanjung hendak naik ke gerbong kereta di Stasiun Sidoarjo, kemarin (19/3). KAI akan menambah armada KA Mutiara Timur saat Lebaran.

10.428 Orang Mudik dari Stasiun Sidoarjo

SIDOARJO - Sebanyak 10.428 orang akan mudik lewat Stasiun Sidoarjo. Daop 8 KAI Surabaya menambahkan armada untuk mengakomodir pemudik.

Manager Humas Daop 8 KAI Sidoarjo Luqman Arif mengatakan, dari data terakhir akan ada 10.428 orang yang akan mudik lewat Stasiun Sidoarjo. "Ini untuk keberangkatan antara tanggal 21 Maret sampai 11 April," ujarnya kemarin (19/3). Sedangkan untuk kedatangan, ada 9.795 pelanggan yang

turun di Stasiun Sidoarjo.

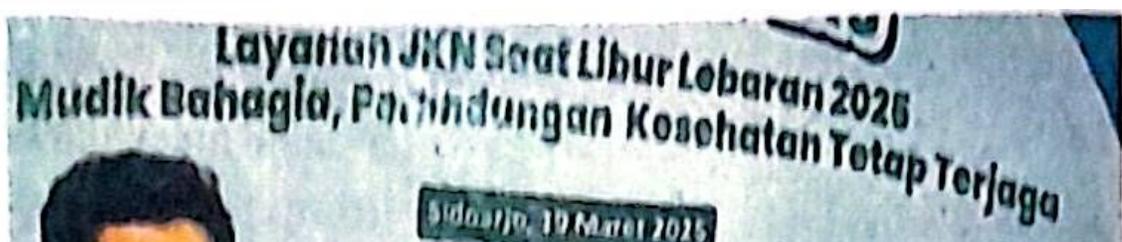
Menurutnya, Stasiun Sidoarjo akan ramai melayani keberangkatan mudik mulai tanggal 24 Maret. Sedangkan puncaknya pada tanggal 29 Maret atau dua hari sebelum lebaran. "Puncaknya H-2 itu ada 1.010 tiket yang akan berangkat di tanggal tersebut," ungkapnya.

Keberangkatan dari Stasiun Sidoarjo didominasi dengan kereta tujuan Bandung, Yogyakarta, serta Ketapang. "Data ini masih akan terus bertambah, karena penjualan tiket

masih berlangsung," jelasnya.

Luqman mengatakan, ada tambahan armada untuk relasi Surabaya Gubeng-Ketapang, di Stasiun Sidoarjo. "Ada tambahan KA Mutiara Timur," katanya. KA tambahan ini memiliki kapasitas 300 tempat duduk penumpang kelas eksekutif.

Di sisi lain, Luqman mengungkapkan, akan ada tambahan fasilitas area parkir kendaraan di Stasiun Sidoarjo. Untukantisipasi lonjakan penitipan saat libur lebaran. (eza/uzi)





AHMAD REZA/JAWA POS

JELANG MUDIK: Kepala BPJS Kesehatan Sidoarjo Munaqib (tengah) bersama Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Danang (kiri) saat paparan layanan kesehatan selama Lebaran kemarin (19/3).

31 Puskesmas Tetap Buka saat Lebaran

SIDOARJO - BPJS Kesehatan Sidoarjo dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo membuka pelayanan kesehatan saat mudik Lebaran tahun ini.

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Sidoarjo Danang Abdul Ghani menyebut, seluruh Puskesmas di Sidoarjo bisa melayani dan melakukan penanganan kesehatan selama libur Lebaran. "Kami ada 31 Puskesmas dan nanti tetap buka selama libur Lebaran," katanya.

Dinkes Sidoarjo juga menyiapkan tenaga kesehatan dan ambulan di 11 titik pos pelayanan yang tergabung dengan polisi dan Dishub Sidoarjo. "Tahun ini ada tambahan dua pos layanan kesehatan di wilayah Selatan, sisanya sembilan posko seperti tahun lalu," ujarnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Munaqib meminta para pemudik memastikan keaktifan kepesertaan JKN miliknya. "Kantor cabang tetap buka, kita juga buka pos layanan di Terminal Bungurasih untuk bantu pemudik," katanya.

Bagi pemudik, dokumen KTP wajib dibawa untuk mendapatkan pelayanan. "Karena sekarang tinggal masukan NIK, sudah bisa mengakses layanan faskes yang bekerjasama

dengan BPJS, tentunya (dan lain-lain)

Jawa Pos

Bertemu KPK, Bupati Diminta Komitmen Kelola Pemerintahan yang Bersih



KOORDINASI: Bupati Sidoarjo Subandi dan Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nashih hadiri rakor dengan KPK di Yogyakarta.

KOTA-Dalam upaya memperkuat komitmen kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Rabu (19/3/2025).

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat tata kelola

pemerintahan daerah pasca-pelantikan kepala daerah baru.

KPK berharap rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi kepala daerah dalam menjaga komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi.

Ketua KPK, Setyo Budi-yanto, menyampaikan bahwa tema rapat yang awalnya berfokus pada "Penguatan Kepala Daerah" lebih tepat diganti menjadi "Komitmen Kepala Daerah." Menurut nya, kepala daerah telah melewati berbagai tantangan, mulai dari proses

pepdaftaran, kampanye, hingga pemilihan yang penuh perjuangan. Setelah dilantik, yang lebih penting adalah menjaga komitmen mereka dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Kepala daerah sudah melewati banyak tantangan. Mereka telah melalui pendidikan, pelatihan, dan proses panjang yang tidak mudah. Setelah dilantik dan mengucapkan sumpah, komitmen mereka untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik harus terus dijaga," ujar Setyo Budi-yanto.

● Ke Halaman 10

Tambah Tiga Jalur di Sistem Penerimaan Siswa Baru



M. SAIFUL FIKHMANFRADAR SIDOARJO
Kepala Dispendikbud
Sidoarjo Tirto Adli

Peraturan tersebut disusun berdasarkan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 dan akan menjadi dasar

DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo tengah menunggu Peraturan Bupati (Perbup) terkait sistem penerimaan siswa baru tahun 2025.

penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas sebagai petunjuk teknis penerimaan siswa baru.

Kepala Dispendikbud Sidoarjo, Tirta Adi, mengungkapkan bahwa penerimaan siswa baru tahun ini akan dibuka melalui beberapa jalur. Selain jalur domisili, afirmasi, dan prestasi, Sidoarjo menambahkan tiga jalur khusus bagi siswa berbakat.

“Jalur pertama adalah Kelas Khusus Olahraga (KKO) yang disediakan bagi siswa berbakat di bidang olahraga,” ujarnya saat ditemui Radar Sidoarjo, Rabu (19/3).

Untuk program ini, Dispendikbud telah menunjuk dua sekolah, yakni SMPN 2 Sidoarjo untuk sekolah negeri dan SMP PGRI 9 Sidoarjo untuk sekolah swasta.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi siswa dalam ajang olahraga tingkat daerah maupun nasional. Dengan pembinaan yang tepat, siswa KKO diharapkan mampu berpartisipasi dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda);

● Ke Halaman 10



M. SAIFUL FOHMAN RADAR SIDOARJO

DIOPTIMALKAN: Layanan BPJS Kesehatan di kantor cabang Sidoarjo.

BPJS Kesehatan Siapkan Posko Mudik, Layanan Tetap Berjalan

BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo mendirikan posko layanan kesehatan bagi para pemudik selama Lebaran 2025. Posko ini disiapkan untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan akses layanan kesehatan bagi pemudik yang membutuhkan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo, Munaqib, mengatakan

bahwa posko tersebut tidak hanya melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi juga masyarakat umum yang membutuhkan bantuan medis selama perjalanan.

"Posko ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi pemudik. Nantinya, posko akan beroperasi mulai 26 hingga 30 Ramadan di titik-titik strategis yang dilalui pemudik," ujarnya saat ditemui Radar Sidoarjo, Rabu (19/3).

Posko mudik akan menyediakan berbagai fasilitas, termasuk tempat istirahat dan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis yang bertugas 24 jam. Selain itu, layanan ambulans juga disiapkan bagi pemudik yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit.

"Jika ada pemudik yang perlu dirujuk ke rumah sakit, ambulans dengan sopir dan tenaga medis siap membantu," tambahnya.

BPJS Kesehatan juga mengimbau pemudik dengan penyakit kronis untuk membawa obat-obatan yang cukup selama perjalanan. Pemegang Program Rujuk Balik (PRB) dapat mengambil obat hingga tujuh hari sebelum jadwal pengambilan rutin.

● Ke Halaman 10

Siapkan Kereta Api Tambahan untuk Mudik Lebaran dari Stasiun Sidoarjo

KOTA-Jumlah penumpang Kereta Api (KA) di Stasiun Sidoarjo diprediksi akan melonjak selama masa mudik Lebaran tahun ini. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, KAI Daop 8 Surabaya menyiapkan kereta api tambahan guna memberikan pilihan perjalanan yang lebih luas bagi masyarakat.

Salah satu kereta api tambahan yang dijadwalkan beroperasi adalah KA Mutiara Timur dengan rute Stasiun Sidoarjo-Stasiun Ketapang, Banyuwangi, dan sebaliknya.

"KA Mutiara Timur tambahan akan beroperasi pada malam hari, dengan keberangkatan dari Stasiun Sidoarjo pukul 22.23 dan tiba di Stasiun Ketapang pukul 03.40," ujar Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, Rabu (19/3).

Sebaliknya, keberangkatan dari Stasiun Ketapang dijadwalkan pukul 08.40 dan tiba di Stasiun Sidoarjo pukul 14.08. KA Mutiara Timur tambahan ini memiliki kapasitas sebanyak 300 tempat duduk di kelas eksekutif.

● Ke Halaman 10



PERSIAPAN: Rangkaian KA Mutlara Timur juga menghadirkan layanan Kereta Panoramic.



LENGANG : Jalan Letjen Sutoyo sudah diujicoba one way.

Dampak One Way, Terminal Purabaya Sediakan Jalur Khusus Bus Ekspedisi

WARU-Uji coba rekayasa arus lalu lintas dengan sistem one way di Jalan Letjen Sutoyo, Waru, Sidoarjo, masih berlangsung hingga Rabu (19/3). Pemberlakuan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan kepadatan kendaraan yang menuju Terminal Purabaya, Bungurasih, selama arus mudik Lebaran.

Uji coba one way ini dilakukan oleh Satuan Pelaksana Sidoarjo dan akan berlangsung selama tiga hari hingga Kamis (20/3). Berdasarkan pantauan Radar Sidoarjo di hari kedua, masih terdapat sejumlah pengendara roda dua yang nekat menerobos jalur dari arah Jembatan Layang Waru menuju Medaeng.

Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Purabaya, Ahmad Badik, meny-

takan bahwa sistem one way ini sangat membantu dalam mengurangi kemacetan di sekitar terminal.

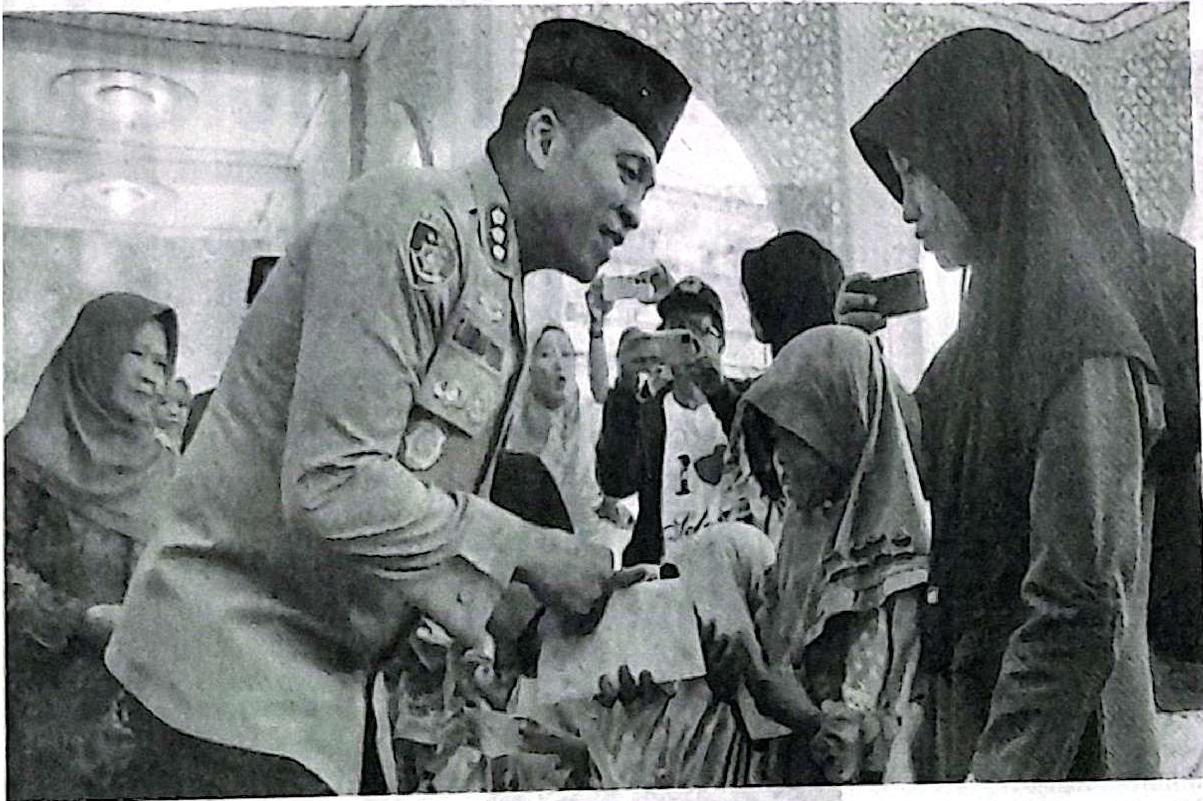
"Sistem one way di Jalan Letjen Sutoyo ini sangat membantu kami dalam mengurangi kemacetan," ujarnya.

Menurutnya, penerapan one way berdampak positif pada titik-titik rawan kemacetan di sekitar terminal. Tercatat ada empat titik yang sering menjadi sumber kepadatan sebelum pintu masuk terminal.

"Kami juga akan melakukan penertiban di titik-titik tersebut agar kemacetan bisa diminimalkan. Salah satu titik yang kerap menyebabkan kemacetan adalah di depan SPBU Jalan Letjen Sutoyo," jelasnya.

● Ke Halaman 10

Safari Ramadan, Sosialisasikan Hotline Mudik untuk Situasi Darurat



BERBAGI:
Kapolresta
Sidoarjo
Kombes Pol
Christian Tobing
saat Safari
Ramadan
bersama anak
yatim.

KOTA-Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing memanfaatkan momen Safari Ramadan tidak hanya untuk berbagi dengan masyarakat, tetapi juga untuk mensosialisasikan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta layanan hotline mudik Polri 110.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Masjid Dar Ali, Banjarpanji, Tanggulangin, Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing bersilaturahmi dengan warga, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Forkopimka setempat. Acara dimulai dengan buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Safari Ramadan ini ber-

tujuan agar Polresta Sidoarjo semakin dekat dengan masyarakat serta dapat berbagi kebahagiaan di bulan suci ini," ujar Kombes Pol Christian Tobing.

Menjelang arus mudik Lebaran, ia mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati saat dalam perjalanan.

Ia juga memperkenalkan layanan hotline mudik Polri 110, yang dapat digunakan oleh pemudik untuk melaporkan kejadian darurat atau gangguan kamtibmas selama perjalanan mudik dan balik.

"Hotline ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat saat mudik," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa hotline Polri 110 da-

pat digunakan untuk melaporkan berbagai kejadian darurat, seperti kecelakaan, tindak kriminalitas, atau gangguan keamanan lainnya.

"Jika menemukan kecelakaan atau aksi kriminalitas selama perjalanan, masyarakat bisa

langsung menghubungi hotline tersebut agar segera mendapat bantuan," tegasnya.

Dengan adanya layanan ini, diharapkan perayaan Idul Fitri tahun ini dapat berlangsung dengan aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. (gun/vga)

PENGUMUMAN PENURUNAN MODAL PT. SUPREMA INVESTASI INDONESIA

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SUPREMA INVESTASI INDONESIA, tertanggal 18 Maret 2025 Nomor: 15, dibuat dihadapan ANWAR, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Gresik, telah disetujui:

1. Penurunan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) menjadi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan cara penarikan kembali modal oleh pemegang saham Perseroan sebesar Rp. 2.140.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah) sehingga modal ditempatkan dan modal disetor turun menjadi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Segala pengajuan keberatan dari kreditor dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat diajukan secara tertulis kepada Direksi:

PT. SUPREMA INVESTASI INDONESIA

Alamat: Ruko Central Square Blok C-5 Jl. A. Yani No. 41-43, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, setelah lamanya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Sidoarjo, 20 Maret 2025

Direksi PT. SUPREMA INVESTASI INDONESIA

BPJS Kesehatan Tetap Buka Selama Libur Lebaran 2025

SIDOARJO - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memastikan bahwa seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa mengakses pelayanan, baik layanan administrasi kepesertaan JKN maupun layanan kesehatan selama libur Lebaran 2025. Kebijakan khusus ini diambil guna mengantisipasi potensi kendala akses pelayanan di masa liburan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan untuk mengakomodir berbagai kebutuhan peserta, BPJS Kesehatan juga menerapkan piket layanan baik di kantor cabang maupun layanan di Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118-165-165 setiap hari selama 24 jam. Di kantor cabang, BPJS Kesehatan menerapkan piket dimulai dari tanggal 28 Maret, 2, 3, 4 dan 7 April 2025, mulai pukul 08.00 - 12.00 waktu setempat.

"Adapun jenis layanan yang masih dapat di dimanfaatkan oleh peserta di antaranya layanan informasi, layanan administrasi, hingga layanan pengaduan. Apabila peserta ingin mengakses layanan digital, peserta juga bisa mengakses melalui Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, hingga website resmi BPJS Kesehatan," kata Ghufron pada Konferensi Pers Pelayanan Mudik Lebaran Tahun 2025, Rabu (19/3/25).

Ghufron mengungkapkan dengan prinsip portabilitas yang diterapkan dalam Program JKN, peserta dapat memperoleh layanan kesehatan di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat mereka terdaftar. Artinya, bagi peserta yang menjalani mudik lebaran, tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan, termasuk saat hari raya Lebaran.

"Di masa libur lebaran, apabila peserta berada di luar daerah tempat asalnya, peserta masih dapat mengakses di fasilitas kesehatan yang bukan tempat dirinya ter-



BPJS Kesehatan Konferensi Pers Layanan JKN, saat libur Lebaran 2025 tetap buka, Rabu (19/3/25)

LGFTV/DUTA

daftar. Jika peserta dalam kondisi kegawatdaruratan medis, seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta," jelas Ghufron.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati menambahkan penjaminan dan prosedur pelayanan terhadap pasien gawat darurat peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila peserta mengalami kendala saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan, peserta dapat menghubungi Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP). Khusus di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga telah menghadirkan Petugas BPJS SATU! (Siap Membantu) untuk mempermudah dalam mengakses informasi pelayanan.

"Namun harus tetap dipastikan bahwa status kepesertaan JKN peserta harus aktif. Jika status kepesertaan JKN-nya tidak aktif karena adanya tunggakan iuran, peserta diharapkan untuk melunasi tunggakan tersebut," ujarnya.

Masih kata Lily menambahkan, apabila peserta merasa berat untuk melunasi tunggakan sekaligus, peserta bisa memanfaatkan Program New Rencana Iuran Bertahap BPJS Kesehatan (REHAB) 2.0 yang terdapat di Aplikasi Mobile JKN. Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan satu juta kanal pembayaran yang memudahkan peserta dalam melakukan

pembayaran iuran JKN," tambah Lily.

Dalam mengantisipasi arus mudik yang tinggi, BPJS Kesehatan juga telah menyiapkan Posko Mudik di tujuh titik dan satu titik Posko Arus Balik padat pemudik. Posko ini tidak hanya memberikan pelayanan kepesertaan JKN, tetapi juga siap menangani keadaan darurat dengan menyediakan obat-obatan dan rujukan medis apabila diperlukan.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sidoarjo Munaqib dalam konferensi Pers Rabu (19/3/25) dengan tema "Layanan JKN saat libur Lebaran 2025, Mudik Bahagia, Perlindungan Kesehatan Tetap Terjaga mengatakan, hal ini untuk persiapan, menginformasikan libur panjang kepada seluruh masyarakat pemudik khususnya.

"Kami membuka posko layanan mudik di terminal Purabaya. Harapannya tidak hanya peserta JKN-nya saja, tapi masyarakat umum juga bisa menggunakan fasilitasnya," ujar Munaqib dalam konferensi pers di kantor BPJS Cabang Sidoarjo

Kami memastikan bahwa masyarakat masih bisa melunasi cek kepesertaannya jangan sampai telat bayar, walaupun telat bayar masih bisa diselesaikan ke petugas dan layanan yang tersedia. Kami tetap memberikan layanan kesehatan yang terbaik masyarakat Sidoarjo khususnya. • Loe

Banjir Sidoarjo Me di Dua Kecamatan

13 Desa Terendam

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Hujan dengan intensitas tinggi di Sidoarjo, Minggu (16/3/2025) membuat banjir di sejumlah kawasan. Hingga hari ini, Senin (17/3/2025) banjir masih menerjang Kecamatan Waru dan Kecamatan Taman.

Banjir ini lantaran Sungai Kalimas di Kecamatan Taman dan tiga sungai di Kecamatan Waru, Sungai Sinir, Sungai Buntung dan Sungai Bulak Dok, meluap.

Pantauan di lokasi, terlihat ada dua jalan utama yang terdampak cukup parah adalah Jalan Trunojoyo (Ruas Jalan Medaeng-Pepelegi) dan Jalan Kolonel Sugiono (kawasan Desa Waru-Kureksari).

Data yang diperoleh dari Kecamatan Waru, banjir merambah 10 desa. Yakni Pepelegi, Medaeng, Bungurasih, Waru, Kureksari, Kedungrejo,

Janti, Kepuhkirimman, Tambakrejo dan Tambaksawah.

Sementara di Kecamatan Taman, ada tiga desa dan satu kelurahan yang ketinggian air mencapai 30-40 cm. Di antaranya Desa Ketegan, Desa Ngelom, Kedungturi dan Kelurahan Wage.

Banjir itu sejak kemarin setelah salat Isya, namun genangan air tinggi mulai pagi sekitar pukul 05.00 WIB. Banjir di Desa Medaeng ini karena Sungai Buntung meluap," kata Antok (48), warga Desa Medaeng RT 20 RW 2. "Banjir ini merupakan langganan, hampir setiap musim hujan bisa mencapai 3 hingga 5 kali dalam musim hujan tersebut," imbuh Antok.

Hal senada disampaikan Sumini (56), warga Desa Medaeng mengaku bahwa banjir di desanya dampak dari meluapnya Sungai Buntung. Ketinggian airnya mencapai satu lutut orang dewasa.

"Kalau sudah banjir lama sekali 4 hingga 7 hari, sampai saat ini pada saat banjir dirinya baru sekali mendapatkan bantuan sembako. Padahal banjir setiap tahun hampir 5 sampai 6 kali," kata Sumini.

Sementara Camat Waru Nawari mengatakan banjir terjadi selain hujan deras, melainkan akibat kiriman air dari daerah lain yang membuat volume air sungainya meluap.

"Intensitas hujan di wilayah kami terlalu tinggi. Namun, aliran air dari hulu yang masuk ke tiga sungai ini menyebabkan debitnya meningkat dan akhirnya meluber ke permukiman," kata Nawari.

Nawari menambahkan, pihak kecamatan terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan BPBD Sidoarjo serta pemerintah desa untuk menangani banjir ini. Warga diminta tetap waspada karena banjir masih



Banjir di Medaeng RT

belum surut di beberapa desa. "Kamiimbau masyarakat tetap berhati-hati, terutama yang berada di kawasan

Belum Ada Pertemuan

PKL Pepelegi dan Sawotratap Tolak Penggusuran, Minta Solusi dari Pemkab

SIDOARJO - Puluhan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Raya Pepelegi, Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, serta Sawotratap, Kecamatan Gedangan, kembali menyampaikan keluhan dan harapan mereka terkait rencana penggusuran lapak usai Lebaran Idul Fitri 2025.

Aspirasi ini disampaikan oleh para PKL dan pengurus paguyuban saat menggelar buka puasa bersama di Warung Ikan Bakar Lae Lae khas Makassar milik Pak Buyung pada Selasa malam (18/3/25).

Sebelumnya, para PKL menerima surat pemberitahuan pelanggaran dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Namun, dalam surat terbaru, BBWS menyerahkan penyelesaian masalah ini kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

Tito Pradopo, penasihat PKL yang akrab disapa Bung Tito, kepada Duta Masyarakat Selasa malam (18/3/25) mengungkapkan bahwa awalnya BBWS menuding keberadaan PKL sebagai penyebab banjir, meskipun menurutnya hal itu tidak benar.

"Setelah kami mengirim surat,



Puluhan pedagang dan pengurus paguyuban PKL Sawotratap dan Pepelegi saat buka puasa bersama Selasa malam (18/3/25)

balasan BBWS akhirnya menyerahkan kewenangan kepada Pemkab Sidoarjo. Saya berharap jangan sampai PKL justru diadu dengan pemerintah. Kami hanya ingin mencari solusi agar tidak digusur, karena ini menyangkut mata pencaharian yang sudah berlangsung bertahun-tahun," ujar Bung Tito.

Ia menegaskan bahwa PKL

mendukung program pemerintah, termasuk penanganan banjir, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Namun, hingga kini mereka belum pernah diajak duduk bersama untuk mencari solusi.

Kami disini sangat mendukung program pemerintah, apalagi masalah banjir. Dan teman-teman PKL juga sangat memelihara kebersihan, tidak hanya berjualan

disini.

"Intinya jangan sampai di gusur, kasihan makan apa mereka itu dan keluarga," pungkas Bung Tito pria yang pernah menjabat ketua DPC PDIP Kab Sidoarjo periode 2004 - 2009 dan 2014 - 2019.

Sementara itu, dengan tegas Ketua Paguyuban PKL, Buyung atau yang akrab disapa Daeng Siruah, berharap pemerintah memahami kondisi para pedagang.

"Kami sudah berusaha menyampaikan aspirasi bersurat ke dinas-dinas terkait dan DPRD, tetapi hingga kini belum ada pertemuan. Kami tidak melawan pemerintah, kami hanya ingin solusi terbaik. Jika memang harus dibongkar, mungkin bisa dibuat box cover sehingga area ini tetap bisa dimanfaatkan sebagai wisata kuliner," usulnya.

"Kami ingin duduk bersama untuk mencari solusi ya bukan cuma itu saja, tapi berharap sangat kepada pemerintah yang sekarang ini dalam arti Pak Bupati dan Wakil Bupati. Pemerintah kita harus mengingat bahwa Pemerintah Pusat menggaungkan UKM, kenapa UKM yang sekarang ada

ini harus dihilangkan, dan untuk hidup setiap harinya kami harus ke mana," pungkas Daeng Siruah

Terpisah Pak Udin, salah satu PKL yang telah berjualan di lokasi tersebut selama lebih dari 30 tahun, juga menyampaikan keberatannya.

"Saya sudah berjualan di sini lebih dari 30 tahun. Kalau digusur, saya harus pindah ke mana? Umur saya sudah 53 tahun, sulit bagi saya mencari pekerjaan lain. Seharusnya pemerintah memberikan solusi terlebih dahulu sebelum menggusur," keluhnya.

"Umur saya sudah 53, kalau saya digusur jadi saya itu mau jualan di mana atau mau kerja apa sedangkan saya sudah tua, jadi mau kerja nggak mungkin lah pabrik dan perusahaan itu memerlukan saya. Pemerintah itu melihat dulu keadaan disini, kalau memang masalah banjir, itu pun banjir itu bukan PKL penyebabnya," ungkap Pak Udin.

Para PKL berharap Pemkab Sidoarjo mau berdialog dengan mereka agar solusi terbaik bisa ditemukan tanpa harus menggusur para pedagang. • Loe

RADAR
SIDOARJO.ID

Bertemu KPK, ...

Setyo juga menekankan pentingnya kolaborasi antara kepala daerah, anggota DPRD, serta instansi penegak hukum dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi.

Ia mengingatkan bahwa meskipun KPK tidak selalu terlihat di lapangan, pihaknya tetap melakukan peman-

tauan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi hadir bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, yang juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Sidoarjo, serta Ketua DPRD Sidoarjo,

Abdillah Nasih, yang juga Badan Anggaran (Banggar) Sidoarjo.

"Alhamdulillah, kami beradaja untuk menghadiri sosialisasi KPK. Hadir pula Pak Ketua Bupati, dan Sekretaris Daerah arjo," ungkap Bupati Subandi.

Bupati Subandi menjelaskan sosialisasi KPK ini menekankan pentingnya sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan aku

RADAR
SIDOARJO.ID



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bertemu KPK, ...

Setyo juga menekankan pentingnya kolaborasi antara kepala daerah, anggota DPRD, serta instansi penegak hukum dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi.

Ia mengingatkan bahwa meskipun KPK tidak selalu terlihat di lapangan, pihaknya tetap melakukan pema-

tauan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi hadir bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, yang juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Sidoarjo, serta Ketua DPRD Sidoarjo,

Abdillah Nasih, yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo.

"Alhamdulillah, kami berada di Jogja untuk menghadiri sosialisasi dari KPK. Hadir pula Pak Ketua DPRD, Bupati, dan Sekretaris Daerah Sidoarjo," ungkap Bupati Subandi.

Bupati Subandi menjelaskan bahwa sosialisasi KPK ini menekankan pentingnya sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus membangun sistem pemerintahan yang transparan. Ia berharap lembaga legislatif dan eksekutif dapat terus berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.

"Hasil sosialisasi ini akan meningkatkan saling pengertian dan mempererat hubungan antara legislatif serta eksekutif agar terus berjalan dengan baik," tambahnya.

Menurutnya, hubungan harmonis

antara legislatif dan eksekutif akan memudahkan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misinya. Banyak materi penting yang disampaikan dalam pemaparan oleh KPK, terutama terkait upaya pencegahan korupsi.

"Intinya, pencegahan korupsi harus menjadi prioritas. Mari kita tetap semangat untuk Sidoarjo," tegas Bupati Subandi yang didampingi Sekda Fenny Apridawati. (sai/vga)



Dampak One Way,...

Kemacetan di depan SPBU sering terjadi akibat bus-bus ekspedisi yang berhenti untuk menaikkan dan menurunkan barang. Untuk mengatasi hal ini, pihak Terminal Purabaya telah menyediakan jalur khusus bagi bus ekspedisi agar tidak mengganggu arus lalu lintas.

"Kami telah menyediakan tempat khusus dan jalur khusus bagi bus

ekspedisi, yaitu di jalur kedatangan paling barat atau jalur nomor satu, sehingga tidak menyebabkan kemacetan," tegasnya.

Ia memprediksi lonjakan penumpang bus akan terjadi pada 27 hingga 28 Maret 2025. Penerapan sistem one way dan jalur khusus ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di Jalan Letjen Sutoyo saat arus mudik Lebaran. (dik/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

BPJS Kesehatan...

Layanan di posko dapat diakses tanpa prosedur administrasi yang rumit. Pemudik cukup menunjukkan identitas dan menjelaskan keluhan kesehatan untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

Dengan adanya posko mudik, BPJS Kesehatan berharap pemudik dapat menjalani perjalanan dengan lebih aman dan nyaman. "Upaya ini merupakan bagian dari komitmen BPJS Kesehatan dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025," tutupnya. (sai/vga)



Dampak One Way,...

Kemacetan di depan SPBU sering terjadi akibat bus-bus ekspedisi yang berhenti untuk menaikkan dan menurunkan barang. Untuk mengatasi hal ini, pihak Terminal Purabaya telah menyediakan jalur khusus bagi bus ekspedisi agar tidak mengganggu arus lalu lintas. "Kami telah menyediakan tempat khusus dan jalur khusus bagi bus

ekspedisi, yaitu di jalur kedatangan paling barat atau jalur nomor satu, sehingga tidak menyebabkan kemacetan," tegasnya.

Ia memprediksi lonjakan penumpang bus akan terjadi pada 27 hingga 28 Maret 2025. Penerapan sistem one way dan jalur khusus ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di Jalan Letjen Sutoyo saat arus mudik Lebaran. (dik/vga)



Beranda > BPJS kesehatan

Selama Libur Lebaran 2025, BPJS Kesehatan Pastikan Akses Layanan JKN Tetap Terbuka

Redaksi @ Maret 19, 2025

0



Jawapos, SIDOARJO – BPJS Kesehatan terus menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa mengakses pelayanan, baik layanan administrasi kepesertaan JKN maupun layanan kesehatan selama libur Lebaran 2025. Kebijakan khusus ini diambil guna mengantisipasi potensi kendala akses pelayanan di masa liburan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan untuk mengakomodir berbagai kebutuhan peserta, BPJS Kesehatan juga menerapkan piket layanan baik di kantor cabang maupun layanan di Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118-165-165 setiap hari selama 24 jam. Di kantor cabang, BPJS Kesehatan menerapkan piket dimulai dari tanggal 28 Maret, 2, 3, 4 dan 7 April 2025, mulai pukul 08.00 - 12.00 waktu setempat.

"Adapun jenis layanan yang masih dapat dimanfaatkan oleh peserta di antaranya layanan informasi, layanan administrasi, hingga layanan pengaduan. Apabila peserta ingin mengakses layanan digital, peserta juga bisa mengakses melalui Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, hingga website resmi BPJS Kesehatan," kata Ghufron pada Konferensi Pers Pelayanan Mudik Lebaran Tahun 2025, Rabu (19/3/2025).

Ghufron mengungkapkan dengan prinsip portabilitas yang diterapkan dalam Program JKN, peserta dapat memperoleh layanan kesehatan di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat mereka terdaftar. Artinya, bagi peserta yang menjalani mudik lebaran, tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan, termasuk saat hari raya Lebaran.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
Tali masa libur lebaran apabila peserta berada di luar daerah tempat tinggalnya, peserta masih dapat mengakses di fasilitas kesehatan yang bukan tempat dirinya terdaftar. Jika peserta dalam kondisi kegawatdaruratan medis, seluruh fasilitas kesehatan wajib

memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta," jelas Ghufron.

BACA JUGA

➤ [Selama Libur Lebaran 2025, BPJS Kesehatan Pastikan Akses Layanan JKN Tetap Terbuka](#)

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati menambahkan penjaminan dan prosedur pelayanan terhadap pasien gawat darurat peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila peserta mengalami kendala saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan, peserta dapat menghubungi Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP). Khusus di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga telah menghadirkan Petugas BPJS SATU! (Siap Membantu) untuk mempermudah dalam mengakses informasi pelayanan.

Sementara itu, selama libur lebaran, ketentuan pelayanan obat Program Rujuk Balik (PRB) tetap mengacu pada kebijakan pelayanan kesehatan di FKTP. Apabila jadwal pengambilan obat PRB jatuh pada masa libur lebaran, maka jadwal dapat disesuaikan menjadi lebih awal maksimal tujuh hari sebelum persediaan obatnya habis.

"Namun harus tetap dipastikan bahwa status kepesertaan JKN peserta harus aktif. Jika status kepesertaan JKN-nya tidak aktif karena adanya tunggakan iuran, peserta diharapkan untuk melunasi tunggakan tersebut. Apabila peserta merasa berat untuk melunasi tunggakan sekaligus, peserta bisa memanfaatkan Program New Rencana Iuran Bertahap BPJS Kesehatan (REHAB) 2.0 yang terdapat di Aplikasi Mobile JKN. Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan satu juta kanal pembayaran yang memudahkan peserta dalam melakukan pembayaran iuran JKN," tambah Lily.

Dalam mengantisipasi arus mudik yang tinggi, BPJS Kesehatan juga telah menyiapkan Posko Mudik di tujuh titik dan satu titik Posko Arus Balik padat pemudik. Posko ini tidak hanya memberikan pelayanan kepesertaan JKN, tetapi juga siap menangani keadaan darurat dengan menyediakan obat-obatan dan rujukan medis apabila diperlukan.

Adapun titik posko yang dihadirkan BPJS Kesehatan pada masa libur lebaran yaitu Terminal Pulo Gedang Jakarta, Rast Area Tol Ungaran Km 429, Terminal Purabaya Sidoarjo, Palabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Merak Banten, Rast Area Tol Cipularang Km 88A Purwakarta, Rast Area Tol Cipali Km 166A Majalangka dan Posko Arus Balik terdapat di Rast Area Tol Cipali Km 164B Majalangka.

"Harapannya, komitmen yang ditunjukkan BPJS Kesehatan pada masa libur lebaran ini juga didukung oleh seluruh mitra fasilitas kesehatan. Dengan terbukanya akses bagi peserta dalam mendapatkan pelayanan di masa libur lebaran, diharapkan fasilitas kesehatan juga berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh peserta, termasuk bagi mereka yang tengah menjalani mudik lebaran," tutupnya. (Tyaz/hms/BPJSKesehatan)

📧 12 Pembaca



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Dhamroni Chudlori saat sidak SDN Desa Suruh, Sukodono plafonnya ambrol, Senin (17/3/2025). (foto - H. Dar/wartanusa.net)

Latest

Pemerintahan

Pendidikan

Ketua Komisi D Sidak Sekolah Rusak, Minta Pemkab Segera Melakukan Perbaikan

18 Maret 2025 | wartanusa | Ketua Komisi D Sidak Sekolah Rusak, Minta Pemkab Segera Melakukan Perbaikan



Sidoarjo -

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Dhamroni Chudlori saat sidak SDN Desa Anggaswangi, Sukodono, Senin (17/3/2025). (foto - H. Dar/wartanusa.net)

wartanusa.net

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, H. Damroni Chudlori melakukan inspeksi mendadak (sidak) gedung sekolah rusak di Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Sukodono, Senin (17/3/2025).

Sidak pertama dilakukan oleh legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu setelah mendapatkan laporan dari warga, kalau siswa-siswi di SDN Anggaswangi 1 harus menjalani proses belajar mengajar secara berdesak-desakan.

"Disini ada dua kelas yang jumlah siswanya berlebihan, yaitu kelas 1 dan kelas 5," kata Aan Syaiful Malik, Kepala SDN Anggaswangi.

Dijelaskan oleh Aan bahwa kelas 1 berjumlah 39 siswa dan kelas 5 sebanyak 38 siswa, sedangkan setiap kelas seharusnya berisi maksimal 28 siswa. Seharusnya kelas 1 dibagi menjadi 2 rombongan belajar (rombel), begitu juga dengan kelas 5 yang sudah semestinya dibagi menjadi 2 rombel atau kelas.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Hal itu terpaksa dilakukan karena SDN Anggaswangi yang jumlah murid keseluruhannya lebih dari 200

siswa itu tidak memiliki ruang kelas baru, sehingga siswa kelas 1 dan kelas 5 terpaksa harus berdesak-desakan saat mengikuti jam pelajaran.

"Untuk itu, kami mohon ada penambahan ruang kelas baru. Apalagi disamping sekolah kami ini banyak berdiri pemukiman-pemukiman baru, yang tidak menutup kemungkinan akan selalu ada peningkatan jumlah siswa setiap tahunnya," jelasnya.

Setelah dari SDN Anggaswangi 1, selanjutnya pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo itu melakukan sidak ke SDN Suruh, Kecamatan Sukodono didampingi H. Tinto Adi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sidoarjo beserta jajarannya.

Kondisi di SDN Suruh lebih memprihatinkan lagi, ada 3 ruang kelas yang tidak bisa dipakai untuk proses belajar mengajar dan terpaksa harus dikosongkan.

Atap bangunan pada ambrol, bahkan kayu wuwung sudah habis dimakan ngengat yang menyebabkan atap bergelombang dan rawan ambruk.

"Disini ada 11 rombongan belajar (rombel), sedangkan jumlah ruangnya ada 9 kelas. Jadi masih kurang 2 kelas lagi,"kata Atik Purwati, Kepala SDN Suruh.

Hal itu semakin diperparah dengan 3 ruang kelas yang terpaksa tidak digunakan sejak setahun lalu, karena mengalami kerusakan parah. Sehingga ada beberapa rombel yang terpaksa harus menjalani proses belajar mengajar di mushola dan perpustakaan.

Mendengar keluhan dari dua SDN di Kecamatan Sukodono itu, H. Damroni meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, khususnya Dikbud Sidoarjo untuk segera mengajukan anggaran perbaikan sekolah-sekolah yang rusak.

"Dengan adanya gedung atau ruang kelas yang mengalami kerusakan menyebabkan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar, red) terganggu, bahkan sampai harus belajar di mushola dan perpustakaan," terangnya.

Menurut politisi asal Kecamatan Tulangan itu, terganggunya proses belajar mengajar akan mengganggu kualitas pembelajaran pada siswa. Serta mengganggu fungsi mushola dan perpustakaan, apabila dipakai atau difungsikan sebagai tempat belajar mengajar.

Apalagi sampai ada bencana ambruknya atap bangunan sekolah yang disebabkan oleh hujan deras atau angin puting beliung. "Tentunya kita semua tidak ingin semua itu terjadi. Maka dari itu, kami minta kepada Pemkab (Sidoarjo, red) agar segera melakukan perbaikan agar tidak mengganggu proses belajar mengajar siswa," harapnya. (dar/nata/red)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ketik.co.id / Kanal Politik & Pemerintahan

Bupati Subandi Tantang Sekda Fenny Apridawati Lebih Berani sebagai Panglima ASN

18 Maret 2025 18:00



Fathur Roziq, Fathur Roziq
Redaksi Ketik.co.id



Prof Bagong Suyanto menanggapi Sekda Dr Fenny Apridawati saat menyampaikan paparan tentang Akselerasi Penanganan Masalah Prioritas Menunjang Visi Misi Kepala Daerah di Pendopo Delta Wibawa pada Senin (17 Maret 2025). (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Politik & Pemerintahan



Aa AA

KETIK, SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana melontarkan tantangan dan harapan kepada pejabat-pejabat Pemkab Sidoarjo. Setelah mendengarkan presentasi mereka, Bupati Subandi maupun Wabup Mimik Idayana menggali lebih dan melontarkan tantangan.

Pada Senin (17 Maret 2025), Sekretaris Daerah Dr Fenny Apridawati menyampaikan paparannya terkait program-program dan inovasinya dalam menjabarkan tugas sebagai Sekda. Materi presentasi Sekda Fenny dinilai bagus oleh para evaluator.

Misalnya, Prof Bagong Suyanto memuji kemampuan Sekda Fenny dalam menjabarkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Sekda Fenny menyampaikan pendekatan hexahelix dalam pelaksanaan pembangunan. Melibatkan pemerintah, industri, perguruan tinggi, masyarakat, media massa, dan lingkungan hidup.

Sekda Fenny juga punya pandangan ke depan tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pemkab Sidoarjo masa depan. Harus juga IT, bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Trading Forex, Indeks, dan
CFD Emas
<13ms eksekusi ultra-
cepat

Trading dengan FxPro

Trade responsibly - responsible to all risks

"SDM merupakan modal dasar. Tidak harus banyak, namun berkualitas. Pelatihan dan pengembangan SDM harus terus dilakukan," kata Sekda Fenny dalam paparannya.



Bupati Subandi bersama Prof Bagong Suyanto dan Prof Seger Handoyo saat menjadi evaluator paparan tentang Akselerasi Pemangan Masalah Prioritas Menuju Visi Misi Kepala Daerah di Pendopo Delta Wibawa pada Senin (17 Maret 2025). (Foto: Kominfo Sidoarjo).

Peran seorang sekretaris daerah (Sekda) hadir sebagai panglima ASN yang transformasional, mampu mengoordinasikan SDM, menguatkan sinergi dan kolaborasi antar-OPD dan hexaheks (pemerintah, industri, perguruan tinggi, masyarakat, media massa, dan lingkungan hidup).

Bupati Sidoarjo Subandi pun memberikan tantangan kepada Sekda Fenny. Sebagai seorang "Panglima ASN" di Pemkab Sidoarjo. Bahwa seorang Sekda tidak boleh punya rasa takut. Ada persoalan segera disikapi, segera ditindaklanjuti.

"Sekda ibarat suami-istri dengan kepala daerah. Kalau ada persoalan harus memberikan masukan," ungkap Bupati Sidoarjo Subandi.

Bupati-Wakil Bupati punya 14 program. Sekda harus berpikir bagaimana caranya 14 program itu bisa selesai. Harus dijalankan. Kalau ada perbedaan pendapat antara kepala daerah dan kepala OPD, harus disampaikan. Tidak apa-apa. Itu bagus.

Baca Juga:

Safari Ramadhan, Pemkab Asahan Kunjungi Dua Masjid dalam Sehari

Sebagai panglima ASN, Sekda sebagai nakhodanya bupati tidak boleh lemah. Kritik wajar. Bupati adalah pelayan. Juragannya adalah rakyat Sidoarjo.

"Baik atau buruk dipaidi sudah biasa. Itu vitamin bagi kita," ungkap Bupati Subandi.

Sekda Fenny diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai nakhoda ASN di Sidoarjo. Tidak perlu ada rasa khawatir terkait kinerja dirinya sebagai sekretaris daerah. Harmonisasi antara bupati dan wakil bupati sudah ditata sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

"Tinggal Bu Sekda pinter-pinter ngeramut. Tahu karakter kepala daerah dan wakil kepala daerah," ujar Bupati Subandi.

Yang tidak kalah penting, Sekda Fenny diingatkan untuk selalu tahu kinerja masing-masing OPD. Juga sampai kecamatan-kecamatan. Bagaimana manajemen camat dalam menahkodai kepala-kepala desa. Bagaimana mereka mendukung visi dan misi bupati.

Bupati Subandi juga menegaskan pentingnya peran Sekda Fenny Apridawati dalam tata kelola keuangan daerah. Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo ingin selamat dalam menjalankan tugas.

Sekda sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus pandai dalam manajemen anggaran. Apalagi sekarang ada efisiensi anggaran terkait Inpres No. 1 Tahun 2025. OPD kadang tidak mau ada pemotongan anggaran. Padahal, itu adalah perintah presiden. Harus dilakukan.

Tidak perlu ada rasa takut menghadapi itu. Tinggal Sekda berkomunikasi dengan bupati dan wakil bupati. Bahwa OPD ini seperti ini. Orangny seperti ini. Walaupun baik kepada pimpinan, tapi manajemennya tidak.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Tahun depan akan kita evaluasi. Kita bisa mengoreksi," tegas Bupati Subandi.

Bupati Subandi menyatakan terima kasihnya kepada Sekda yang telah bekerja keras. Melakukan berbagai perubahan untuk kemajuan Kabupaten Sidoarjo.



Sekda Dr Fenny Apridawati menyampaikan paparan tentang Akselerasi Penangan Masalah Prioritas Menunjang Visi Misi Kepala Daerah di Pendapa Deita Wibawa pada Senin (17 Maret 2025). (Foto: Fathur Raziq/Ketik.co.id).

Menanggapi tantangan itu, Sekda Fenny menyatakan dirinya menerima berbagai masukan dari Bupati Subandi. Siap melakukan kolaborasi, kerja sama, kemitraan dengan berbagai pihak. Secara *hexahelix*.

Dia menanggapi secara khusus tentang harapan bahwa Bupati dan Wakil Bupati selalu selamat dalam menjalankan tugas. Harapan itu, rupanya, disaksikan oleh Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tekad dan harapan bupati diapresiasi.

Kepada Bupati Subandi, Sekda Fenny menyatakan siap memenuhi harapan tersebut. Selamat dunia akhirat. Dia bertekad tidak akan main-main dalam program-program. Selalu melaksanakan program-program sesuai regulasi. Harus pula bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sekda Fenny juga menyatakan dirinya telah melaksanakan perintah untuk merancang *grand design* dan *master plan*. Bekerja sama dengan ITS. Khususnya pakar dan ahli penataan wilayah dan tata kota.

"Dalam waktu tidak terlalu lama, terwujud harapan Bupati Subandi untuk memiliki *grand design* dan *master plan* pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik," pungkas Sekda Fenny Apridawati. (*)



Sedangkan porsi APBD sebesar Rp 34,9 miliar dan pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) mencapai Rp 224 miliar. Sementara penggunaan anggaran untuk pengelolaan sampah hanya senilai Rp 2,16 miliar.

"Kalau dinilai anggaran sebesar itu masih kurang mencukupi untuk penanganan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo, kami (Tim Badan Anggaran DPRD Sidoarjo) siap mendorong penambahan anggaran ke Tim Anggaran (Timgar) Pemkab Sidoarjo. Harapannya, agar siklus penanganan sampah tertangani dengan baik, menyeluruh dan bisa menyelamatkan lingkungan. Sekaligus penanganan sampahnya ramah lingkungan," ujar anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, Muh Zakaria Dimas Pratama kepada republikjatim.com, Rabu (19/03/2025).



Lebih jauh, politisi Partai Nasdem Sidoarjo yang akrab disapa Dimas ini mendorong DLHK Pemkab Sidoarjo untuk menangani pengelolaan sampah mulai dari hulu yakni sampah rumah tangga dan industri hingga ke TPA Griyo Mulyo Jabon. Salah satu caranya yakni dengan melibatkan masyarakat dan Pemerintah Desa (Pemdes). Apalagi, saat ini sudah terbangun sebanyak 111 Tempat Pengelolaan Sampah Reuse Reduce Recycle (TPS3R) di ratusan desa itu.

"Kami mendorong DLHK sebagai leading sektor dalam penanganan sampah melibatkan masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah. Karena ini memegang peranan penting dan bisa memegang peran kunci penting dalam penanganan sampah secara berkesinambungan. Mulai dari rumah tangga sampai industri harus memilah-milah sampahnya agar tidak semua terbuang percuma dan menumpuk di TPA Griyo Mulyo Jabon," pinta Dimas yang juga sebagai Ketua Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Sidoarjo ini.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KPK Tekankan Komitmen Kepala Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih



Redaksi 3 Min Doco
19 Maret 2025



Foto: Bupati Sidoarjo, H. Subandi, SH, Mkn menghadiri acara dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah di Jogja Expo Center, Yogyakarta.

Republiknews.com, Sidoarjo – Dalam upaya memperkuat komitmen kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Rabu (19/3/2025).

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah pasca-pelantikan kepala daerah baru.



THIS IS
BANTOR
130X600

idtheme



KPK berharap rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi kepala daerah untuk menjaga komitmen mereka terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi.

Ketua KPK, Setyo Budiyo, menyampaikan bahwa tema rapat yang awalnya berfokus pada "Penguatan Kepala Daerah" lebih tepat diganti menjadi "Komitmen Kepala Daerah." Menurutnya, kepala daerah sudah cukup kuat karena telah melewati berbagai tantangan, mulai dari proses pendaftaran, kampanye, hingga pemilihan yang penuh perjuangan. Setelah dilantik, yang lebih penting adalah menjaga komitmen mereka terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Kepala daerah sudah melewati banyak tantangan. Mereka telah melalui pendidikan, pelatihan, dan proses panjang yang tidak mudah. Setelah dilantik dan mengucapkan sumpah, komitmen mereka untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik harus terus dijaga," ujar Setyo Budiyo.

Setyo juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara kepala daerah, anggota DPRD, serta instansi penegak hukum dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi. Ia mengingatkan bahwa meskipun KPK tidak selalu terlihat di lapangan, pihaknya tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi hadir bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, yang juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Sidoarjo, serta Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo.

"Alhamdulillah, kami berada di Jagja untuk menghadiri sosialisasi dari KPK. Hadir pula Pak Ketua DPRD, Bupati, dan Sekretaris Daerah Sidoarjo," ungkap Bupati Subandi.

Bupati Subandi menjelaskan bahwa sosialisasi KPK ini menekankan pentingnya sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sistem pemerintahan yang transparan ini terus dibangun di Kabupaten Sidoarjo. Ia berharap lembaga legislatif dan eksekutif dapat terus berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.

"Hasil sosialisasi ini akan meningkatkan saling pengertian dan mempererat hubungan antara legislatif serta eksekutif agar terus berjalan dengan baik," tambahnya.

Menurutnya, hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif akan memudahkan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misinya. Banyak materi penting yang disampaikan dalam pemaparan oleh KPK, terutama terkait upaya pencegahan korupsi.

"Intinya, pencegahan korupsi harus menjadi prioritas. Mari kita tetap semangat untuk Sidoarjo," tegas Bupati Subandi yang didampingi Sekda Fenny Apridawati.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah narasumber dan pejabat daerah yang berperan dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi. Subandi berharap, dengan kerja sama dan komitmen bersama, Indonesia dapat dikelola secara bersih, bermartabat, dan jauh dari praktik korupsi.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah, agar kita dapat terus berupaya memerangi korupsi dan membangun bangsa yang berkeadilan," pungkasnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bagi Dimasaz mengajak masyarakat desa dalam penanganan sampah di Kabupaten Sidoarjo ini bisa menjadi bagian solusi tersendiri. Salah satu kunci dan peran utamanya adalah dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Misalnya ibu rumah tangga diberi pemahaman soal pemilahan sampah yang bisa dikumpulkan dan dijual di Bank Sampah yang ada di setiap Desa atau Rukun Warga (RW) di setiap desa dan kelurahan.

"Artinya kita semua bisa mengajak masyarakat di tingkat desa atau kelurahan mengubah main setnya. Misalnya bagaimana masyarakat ini memahami dan mampu menjadikan sampah sebagai berkah tersendiri. Karena masyarakat desa di seluruh Kabupaten Sidoarjo diajak untuk menjadi bagian dari solusi dan memegang peran kunci dalam pengelolaan sampah kami yakin akan terus menerus terjadi penurunan volume sampah di TPA Griyo Mulyo Jabon," tegas politis muda Partai Nasdem Sidoarjo dari Daerah Pilihan (Dapil) V Kecamatan Taman dan Kecamatan Sukodono ini.



Rabu, 19 Mar 2025 17:15 WIB

Siapkan Tata Kelola Pemerintah Bersih, KPK Tekankan Komitmen Kepala Daerah Saat Rakor di Yogyakarta



ADVERTISEMENT

Tidak hanya itu, kata Ketua DPD Partai Nasdem Sidoarjo ini pihaknya sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo juga siap mendorong penambahan anggaran pengelolaan sampah. Baginya tidak ada persoalan mendasar penambahan anggaran untuk penanganan sampah yang selama ini sudah menjadi problematika di Sidoarjo selama beberapa tahun terakhir ini. Apalagi penanganan sampah yang tidak maksimal bisa memicu banjir di mana-mana setiap memasuki musim penghujan.

"Kami selalu siap menyetujui penambahan anggaran pengelolaan sampah. Karena ini sangat penting. Apalagi, berdasarkan data SIPSN Kemen-LHK Tahun 2025 pada Tahun 2024 timbunan sampah di Sidoarjo sebanyak 313,40 ribu ton, sampah terkelola 200,98 ribu ton dan sampah didaur ulang 15,78 ribu ton. Artinya hanya 5,03 persen saja yang bisa didaur ulang. Makanya, DLHK Pemkab Sidoarjo harus bisa lebih optimal lagi termasuk dari sisi anggaran penanganan sampah di Kabupaten Sidoarjo yang hanya sebesar 0,44 persen atau sebesar Rp 2.164.902.923 dari postur APBD Sidoarjo. Kami menilai anggaran itu belum mampu mengcover penanganan dan pengelolaan sampah di Sidoarjo yang juga kerap menjadi bagian dari salah satu persoalan yang memicu banjir langganan di Sidoarjo," papar Dimas yang juga mantan aktivis mahasiswa ini.

Hal yang sama disampaikan anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, M Nizar. Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sidoarjo ini, saat ini juga dibutuhkan Monitoring dan Evaluasi (Monev) fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah Reuse-Reduce-Recycle (TPS3R) di 111 titik di Kabupaten Sidoarjo. Misalinya apakah dari ratusan TPS3R itu sudah bisa dimanfaatkan secara maksimal secara keseluruhan. Atau sebagian justru belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena kendala mesin atau kelistrikan.

"Semua itu harus berjalan kontinyu dan konsisten. Karena dalam pengelolaan sampah secara global di wilayah Kabupaten Sidoarjo juga dibutuhkan pengelolaan TPS3R secara profesional. Semua itu demi menekan timbunan sampah atau overload sampah di TPA Griyo Mulyo Jabon," jelas Nizar yang juga politisi senior Partai Golkar dari Dapil IV Kecamatan Krian, Balongbendo dan Kecamatan Tarik ini.



Rabu, 19 Mar 2025 15:34 WIB
Peserta Bisa Dilayani Diluar Daerah Asal, BPJS Kesehatan Sidoarjo Pastikan Akses Layanan JKN Tetap Berjalan Saat Lebaran

Sedangkan anggota Komisi C DPRD Sidoarjo lainnya, Dr Emil Firdaus justru lebih menyaroti soal anggaran CSR perusahaan di Sidoarjo yang sudah bertahun-tahun digembar gembarkan untuk penanganan dan pengelolaan sampah. Akan tetapi sampai saat ini, belum ada anggaran CSR yang dikhususkan untuk penanganan sampah di Sidoarjo.

"Kalau DLHK bertugas menyadarkan masyarakat desa soal pentingnya penanganan dan pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir, maka Pemkab Sidoarjo terutama pejabat utamanya selayaknya mengajak semua perumusan yang ada di bumi Delta ini bisa memanfaatkan sebagai besar CSR-nya untuk penanganan dan pengelolaan sampah. Agar semua tertangani dengan baik dan komprehensif," tandas Ketua DPD PAN Sidoarjo sekaligus Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sidoarjo ini.

Sementara Kepala DLHK Pemkab Sidoarjo, M Bahrul Amiq mengaku siap menerima dan menjalankan semua masukan DPRD Sidoarjo itu. Pihaknya juga berjanji bakal mengoptimalkan kinerja BLUD Sampah sekaligus optimalisasi pola tarif sampah.

